



BUPATI KARIMUN

PENGUMUMAN

Nomor: 625/810/XI/2019

TENTANG

SELEKSI PENERIMAAN CALON PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN KARIMUN TAHUN 2019

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil dan Surat Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 646 Tahun 2019 Tentang Penetapan Kebutuhan Pegawai Negeri Sipil Di Lingkungan Kabupaten Karimun Tahun Anggaran 2019, Pemerintah Kabupaten Karimun membuka kesempatan bagi Warga Negara Republik Indonesia yang berminat menjadi Calon Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Kabupaten Karimun, dengan ketentuan sebagai berikut:

I. INFORMASI UMUM

Alokasi kebutuhan formasi yang telah ditetapkan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Karimun sebanyak **122 (seratus dua puluh dua)** formasi, terdiri dari :

1. Kebutuhan Formasi bagi Penyandang Disabilitas sebanyak 2 (dua) formasi dari Tenaga Guru.
2. Kebutuhan Formasi Umum, terdiri dari :
 - a. 48 (empat puluh delapan) formasi Tenaga Guru.
 - b. 41 (empat puluh satu) formasi Tenaga Kesehatan.
 - c. 31 (tiga puluh satu) formasi Tenaga Teknis.
3. Pelaksanaan pendaftaran dilakukan secara daring/online melalui portal <http://sscasn.bkn.go.id>.
4. Pelamar harus memberikan informasi/data diri yang benar dan dapat dipertanggungjawabkan dalam pendaftaran secara daring/online;
5. Pelaksanaan Seleksi Kompetensi Dasar (SKD) dan Seleksi Kompetensi Bidang (SKB) dilaksanakan dengan sistem *Computer Assisted Test* (CAT);
6. Pelamar dinyatakan **LULUS CPNS** setelah mendapat pengesahan **Nomor Induk Pegawai**.

II. PERSYARATAN UMUM

1. Warga Negara Indonesia yang memiliki kualifikasi pendidikan (jenjang dan jurusan) sesuai dengan persyaratan jabatan yang dibutuhkan;
2. Usia paling rendah **18 (delapan belas)** tahun dan paling tinggi **35 (tiga puluh lima)** tahun pada saat **mendaftar**, ditunjukkan dengan Kartu Tanda Penduduk Elektronik (KTP-EI) atau Surat Keterangan yang dikeluarkan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil setempat dan sesuai dengan yang tertera pada Ijazah;
3. Khusus untuk Jabatan Dokter, Dokter Gigi dengan kualifikasi pendidikan **Dokter Spesialis** dan **Dokter Gigi Spesialis** usia paling tinggi **40 (empat puluh)** tahun pada saat **mendaftar**, ditunjukkan dengan Kartu Tanda Penduduk Elektronik (KTP Elektronik) atau Surat Keterangan yang dikeluarkan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil setempat dan sesuai dengan yang tertera pada Ijazah (**sesuai KEPPRES No. 17 Tahun 2019**);
4. Tidak pernah diberhentikan dengan hormat tidak atas permintaan sendiri atau diberhentikan tidak dengan hormat sebagai CPNS/PNS/Anggota TNI/Polri atau diberhentikan tidak dengan hormat sebagai CPNS/PNS/Anggota TNI/Polri/Pegawai BUMN/BUMD atau diberhentikan tidak dengan hormat sebagai pegawai swasta;
5. Tidak berkedudukan sebagai CPNS/PNS/Calon Anggota TNI/Polri serta Anggota TNI/Polri/Siswa Sekolah Ikatan Dinas Pemerintah;
6. Tidak menjadi anggota atau pengurus partai politik atau terlibat politik praktis;
7. Memiliki kualifikasi pendidikan sesuai dengan persyaratan jabatan;
8. Sehat jasmani dan rohani sesuai dengan persyaratan jabatan yang dilamar;
9. Bersedia ditempatkan di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia atau negara lain yang ditentukan oleh instansi pemerintah;
10. Calon Pelamar **hanya boleh mendaftar 1 (satu) jabatan** pada **1 (satu) instansi** dalam satu periode/event pelaksanaan seleksi;
11. Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) calon pelamar **yang berdomisili di wilayah Kabupaten Karimun** dengan kualifikasi pendidikan D-III dan jenjang D-IV/S-1 **minimal 2,00 (dua koma nol nol)** dan dibuktikan dengan Kartu Tanda Penduduk Elektronik (KTP-EI) yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Karimun;
12. Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) calon pelamar **yang berdomisili di luar wilayah Kabupaten Karimun** dengan kualifikasi pendidikan D-III dan jenjang D-IV/S-1 **minimal 2,75 (dua koma tujuh lima)**;

13. Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) calon pelamar profesi dokter/dokter gigi/dokter spesialis/apoteker, **yang berdomisili di wilayah Kabupaten Karimun Ijazah Kesarjanaan dan Ijazah Profesinya minimal 2,75 (dua koma tujuh lima);**
14. Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) calon pelamar profesi dokter/dokter gigi/dokter spesialis/apoteker, **yang berdomisili di luar wilayah Kabupaten Karimun, Ijazah Kesarjanaan dan Ijazah Profesinya minimal 3,00 (tiga koma nol nol);**
15. Bagi lulusan Perguruan Tinggi Dalam Negeri, **Perguruan Tinggi dan Program Studinya telah terakreditasi** dalam Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi (BAN-PT) dan/atau PUSDIKNAKES/LAM-PTKes **pada saat kelulusan** dan dibuktikan dengan **Sertifikat Akreditasi;**
16. Bagi lulusan Perguruan Tinggi Luar Negeri telah memperoleh penetapan penyetaraan dari Panitia Penilaian Ijazah Luar Negeri pada Kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan tinggi;
17. Pelamar dari Penyandang Disabilitas **wajib** melampirkan surat keterangan dokter Rumah Sakit Pemerintah/Puskesmas yang menerangkan jenis dan derajat kedisabilitasnya;
18. Pelamar untuk formasi Tenaga Kesehatan diwajibkan melampirkan **Surat Tanda Registrasi (STR)** yang masih berlaku pada saat pendaftaran, tidak berlaku untuk **STR Internship;**
19. Pelamar untuk formasi Tenaga Guru **DAPAT** melampirkan Sertifikat Pendidik (**SERDIK**) sesuai dengan jabatan Formasi Guru yang dilamar (linier) yang dikeluarkan oleh KEMENDIKBUD/KEMENRISTEKDIKTI/ KEMENAG **bagi yang telah memiliki;**
20. Peserta **P1/TL** dapat mendaftar dan mengikuti Seleksi CPNS Tahun 2019 dengan menggunakan kualifikasi pendidikan yang sama saat melamar sebagai CPNS tahun 2018 pada jabatan dan instansi yang diinginkan baik sama maupun tidak sama dengan yang dilamar saat mendaftar sebagai CPNS Tahun 2018;

III. KRITERIA PELAMAR

1. **Disabilitas** adalah pelamar yang mengalami keterbatasan fisik, kelainan, kerusakan pada fungsi gerak yang diakibatkan oleh kecelakaan atau pembawaan sejak lahir (**bukan disabilitas intelektual, mental, dan/atau sensorik**) dengan ketentuan **mampu melakukan tugas seperti menganalisa, mengetik, menyampaikan buah pikiran, dan berdiskusi.**
Contoh: amputasi, *celebral palsy* (kelainan kongenital pada gerakan, otot, atau postur) dan orang kecil;
2. **Umum** adalah pelamar yang tidak termasuk kriteria pelamar pada angka 1;

IV. TATA CARA PENDAFTARAN

1. Calon pelamar seleksi penerimaan CPNS Pemerintah Kabupaten Karimun Tahun 2019 **harus membaca dengan cermat** Pengumuman Seleksi Penerimaan CPNS berikut persyaratan yang ditetapkan oleh Pemerintah Kabupaten Karimun;
2. Calon pelamar seleksi penerimaan CPNS Pemerintah Kabupaten Karimun Tahun 2019 dapat melakukan pendaftaran secara *online* di <http://sscasn.bkn.go.id>; yang dibuka pada tanggal **11 November 2019 sampai dengan 24 November 2019;**
3. Pada saat pendaftaran secara *online*, pelamar harus membaca dengan cermat petunjuk pendaftaran *online* dan mencermati setiap keterangan/instruksi/pemberitahuan/peringatan yang muncul di halaman-halaman pendaftaran *online* tersebut;
4. Calon Pelamar Seleksi Penerimaan CPNS Pemerintah Kabupaten Karimun Tahun 2019 wajib memiliki Surat Elektronik (*email*) yang masih aktif/berlaku;
5. Calon pelamar membuat akun di portal <https://sscasn.bkn.go.id> dengan cara:
 - Isi Nomor Induk Kependudukan (NIK) dan Nomor Kartu Keluarga (KK) atau Nomor Induk Kependudukan (NIK) kepala keluarga pada Kartu Keluarga (KK);
 - Isi biodata dan kolom lainnya;
 - Unggah pasfoto dengan latar belakang warna **MERAH** ukuran 4x6 dalam format JPG;
 - Cetak KARTU INFORMASI AKUN.
6. Calon pelamar login ke portal <https://sscasn.bkn.go.id> menggunakan **NIK dan password yang telah didaftarkan;**
7. Pelamar menyampaikan kelengkapan berkas dengan cara mengunggah/mengupload dokumen sebagaimana tercantum dalam persyaratan ke website <https://sscasn.bkn.go.id> dengan langkah:
 - a. Mengunggah **FOTO SELFIE (SWAFOTO)** dengan memperlihatkan **KTP Elektronik** atau Surat Keterangan dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dan **Kartu Informasi Akun;**
 - b. Mengisi biodata Calon Pelamar CPNS;
 - c. Pelamar memilih instansi **PEMERINTAH KABUPATEN KARIMUN**, dilanjutkan dengan memilih jenis formasi, jabatan sesuai kualifikasi pendidikan, lokasi formasi, dan lokasi tes, serta mengisi data lain yang harus dilengkapi;
 - d. Mengunggah/mengupload hasil *scanning* dokumen sebagai berikut :
 - 1) KTP Elektronik Asli dalam format **JPEG** dengan ukuran maksimal **200 kB;**
 - 2) Pas Foto ukuran 4 x 6 latar belakang **MERAH** dalam format **JPEG** dengan ukuran maksimal **200 kB;**
 - 3) Ijazah Asli sesuai kualifikasi pendidikan ditambah dengan *scan* Surat Tanda Registrasi (STR) untuk pelamar Jabatan Kesehatan atau Sertifikat Pendidik (SERDIK) dan digabungkan menjadi 1 (satu) file dalam bentuk PDF dengan ukuran maksimal **800 kB ;**
 - 4) Transkrip Nilai Asli digabungkan menjadi 1 (satu) file dalam bentuk PDF dengan ukuran maksimal **600 kB**
 - 5) Surat Lamaran yang bermaterai Rp. 6.000,- dan ditandatangani oleh pelamar dalam format PDF dengan ukuran maksimal **300 kB;**

- 6) Dokumen pendukung lainnya di **scan** dan digabungkan menjadi 1 (satu) file dalam bentuk PDF dengan ukuran maksimal **800 kB**, dapat berupa :
 - Surat Pernyataan (sesuai pada anak lampiran 4 Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 14 tahun 2018)
 - Sertifikat Akreditasi Perguruan Tinggi dan Sertifikat Akreditasi Program Pendidikan (PRODI).
 - Surat Keterangan dari Dokter Rumah Sakit Pemerintah/Puskesmas yang menerangkan jenis dan derajat kedisabilitasannya (**khusus bagi pelamar disabilitas**);
8. Pastikan dokumen yang diunggah dapat terbaca. Kesalahan dalam mengunggah dokumen dapat mengakibatkan pelamar tidak lulus seleksi administrasi;
9. Simpan data yang telah dicek pada "form Resume" dan pastikan data tersebut telah terisi dengan lengkap dan benar
10. Setelah pelamar mengunggah semua dokumen yang dipersyaratkan, pelamar dapat mencetak **KARTU PENDAFTARAN**;
11. Surat Lamaran dan Surat Pernyataan (sesuai pada anak lampiran 4 Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 14 tahun 2018) diketik menggunakan huruf **Arial**, ukuran **12** dan dengan menggunakan Kertas **F4/Folio** ditandatangani asli di atas materai Rp. 6000,- ditujukan **KEPADA BUPATI KARIMUN DI Cq. PANITIA SELEKSI PENERIMAAN CPNS DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN KARIMUN DI TANJUNG BALAI KARIMUN**;
12. Apabila pelamar tidak memenuhi ketentuan persyaratan administrasi pendaftaran di atas, maka pelamar **DINYATAKAN GUGUR**;
13. Semua informasi atau data yang diisikan dalam formulir pendaftaran berdasarkan dokumen asli secara benar dan dapat dipertanggungjawabkan. Apabila data yang diisikan tidak benar, maka pelamar dapat **DINYATAKAN GUGUR** dan **tidak dapat diproses lebih lanjut** serta akan dilaporkan ke pihak kepolisian setempat;
14. Apabila pelamar tidak bisa mendaftar terkait data NIK dan Nomor Kartu Keluarga Calon Pelamar, silahkan menghubungi **Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil** sesuai dengan KTP pelamar, bukan menghubungi ke Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM Kabupaten Karimun;
15. Pelamar dapat mengikuti seleksi selanjutnya apabila dinyatakan lulus seleksi administrasi oleh Panitia Seleksi Instansi Pengadaan PNS, sesuai dengan persyaratan yang telah ditentukan;
16. Informasi lengkap tentang Petunjuk Pendaftaran SSCASN 2019 dapat dilihat atau diunduh di laman <https://sscasn.bkn.go.id>

V. PENGATURAN PESERTA SELEKSI YANG TERMASUK KATEGORI P1/TL

1. Peserta P1/TL dapat mendaftar dan mengikuti seleksi CPNS Tahun 2019 dengan menggunakan kualifikasi pendidikan yang sama saat melamar sebagai CPNS Tahun 2018, pada jabatan dan instansi yang diinginkan baik sama ataupun tidak sama dengan yang dilamar saat mendaftar sebagai CPNS Tahun 2018;
2. Pelamar dari P1/TL wajib mendaftar di SSCASN dengan menggunakan NIK yang sama dengan yang digunakan saat pendaftaran seleksi CPNS Tahun 2018 dan dilakukan proses pendaftaran/pengunggahan dokumen sebagaimana yang dipersyaratkan oleh instansi yang dilamarnya. Apabila yang bersangkutan tidak memenuhi persyaratan administrasi maka dapat digugurkan
3. Peserta P1/TL diberikan peluang menggunakan nilai terbaik antara nilai SKD Tahun 2018 dan nilai SKD Tahun 2019, sebagai dasar untuk dapat mengikuti tahap SKB selanjutnya.
4. Data Peserta P1/TL sebagaimana dimaksud, didasarkan pada basis data hasil SKD tahun 2018 yang disimpan dalam SSCASN BKN

VI. SELEKSI DAN PELAKSANAAN UJIAN

1. **Seleksi**
Tahapan Seleksi Calon Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Karimun Tahun 2019 terdiri atas 3 (tiga) tahap dengan sistem gugur yang meliputi:
 - 1.1. Seleksi Administrasi;
 - 1.2. Seleksi Kompetensi Dasar (SKD) menggunakan *Computer Assisted Test* (CAT), dengan bobot 40%;
 - 1.3. Seleksi Kompetensi Bidang (SKB) menggunakan *Computer Assisted Test* (CAT), dengan bobot 60%
2. **Pelaksanaan Ujian**
Pelaksanaan ujian bertempat di Gedung Nilam Sari Kantor Bupati Karimun Jl. Jend. Sudirman – Poros Tanjung Balai Karimun.
3. **Pengumuman Hasil Seleksi**
 - 3.1. Hasil Seleksi Administrasi diumumkan melalui <http://sscasn.bkn.go.id> dan www.bkpsdm.karimunkab.go.id;
 - 3.2. Sebelum pengumuman Hasil Seleksi Administrasi, sebagaimana dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 23 Tahun 2019 tentang Kriteria Penetapan Kebutuhan Pegawai Negeri Sipil dan Pelaksanaan Seleksi Calon Pegawai Negeri Sipil Tahun 2019, pelamar formasi **disabilitas wajib hadir di Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia** untuk memastikan kesesuaian formasi dengan jenis dan derajat kedisabilitasannya pada tanggal **2 s.d. 6 Desember 2019**

VII. KETENTUAN LAIN

1. Seleksi penerimaan CPNS Tahun 2019 wajib menggunakan sistem CAT (*Computer Assisted Test*);
2. Pemerintah Kabupaten Karimun tidak bertanggung jawab atas pungutan atau tawaran berupa apapun dari oknum-oknum yang mengatas namakan Panitia Seleksi Penerimaan CPNS Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Karimun;
3. Kelulusan peserta merupakan hasil/prestasi peserta sendiri. Apabila diketahui dan dapat dibuktikan bahwa kelulusannya karena kecurangan/pelangaran, maka akan diproses sesuai hukum yang berlaku dan **DIGUGURKAN KELULUSANNYA**;

4. Informasi resmi yang terkait dengan seleksi CPNS Tahun 2019 hanya dapat dilihat dalam situs *online* <http://sscasn.bkn.go.id> dan www.bkpsdm.karimunkab.go.id;
5. Para calon pelamar disarankan untuk terus memantau situs tersebut pada angka 4 (empat) untuk melihat pengumuman-pengumuman penting lainnya serta waktu dan tempat pelaksanaan ujian;
6. Apabila setiap pelamar memberikan keterangan/data yang tidak benar dan di kemudian hari diketahui, baik pada setiap tahapan pendaftaran, seleksi, maupun setelah diangkat menjadi CPNS/PNS, maka Pemerintah Kabupaten Karimun berhak **MENGGUGURKAN KELULUSAN** tersebut dan/atau diberhentikan tidak dengan hormat sebagai CPNS/PNS, menuntut ganti rugi atas kerugian negara yang terjadi akibat keterangan yang tidak benar tersebut, dan melaporkan sebagai tindak pidana ke pihak yang berwajib;
7. Apabila terdapat peserta yang telah dinyatakan lulus dan diterima kemudian mengundurkan diri/digugurkan, maka Panitia dapat menggantikan dengan peserta yang memiliki peringkat terbaik di bawahnya;
8. Untuk mengikuti seluruh seleksi penerimaan CPNS Tahun 2019, para peserta tes **TIDAK DIPUNGUT BIAYA** apapun;
9. Keputusan Panitia Seleksi Instansi Pengadaan PNS Tahun 2019 tidak dapat diganggu gugat dan bersifat mutlak.
10. Pelamar dinyatakan **lulus CPNS** setelah mendapat pengesahan **Nomor Induk Pegawai (NIP)** dari **Badan Kepegawaian Negara**.
11. Apabila ada perubahan jadwal pendaftaran dan hal-hal lainnya, akan segera diumumkan melalui Portal SSCASN Tahun 2019 <http://sscasn.bkn.go.id> dan www.bkpsdm.karimunkab.go.id serta media cetak lokal;
12. Pelayanan dan penjelasan informasi serta pengaduan terkait pelaksanaan seleksi CPNS Pemerintah Kabupaten Karimun Tahun 2019 dapat menghubungi:
 - a. Nomor 081361089260 pada hari Senin s.d. Jumat pukul 08.30 s/d 16.00 wib
 - b. Email : casnkabkarimun@gmail.com pada hari Senin s.d. Jumat pukul 08.30 s/d 16.00 wib;

VIII. JADWAL SELEKSI

NO	KEGIATAN	TANGGAL ^{*)}	KET
1	Pengumuman Seleksi Penerimaan CPNS di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Karimun	11 November 2019	
2	Pendaftaran Online melalui https://sscasn.bkn.go.id	11 – 24 November 2019	
3	Verifikasi Dokumen Pelamar	12 November 2019 s/d 12 Desember 2019	
4	Pengumuman Hasil Seleksi Administrasi	16 Desember 2019	
5	Masa Sanggah	17 – 19 Desember 2019	
6	Pengumuman Hasil Sanggah	26 Desember 2019	
7	Pengumuman Jadwal Pelaksanaan SKD	Januari 2020	Diinformasikan lebih lanjut melalui http://sscasn.bkn.go.id dan bkpsdm.karimunkab.go.id serta media cetak lokal
8	Pelaksanaan Seleksi Kompetensi Dasar (SKD)	Februari 2020	
9	Pengumuman Hasil Seleksi Kompetensi Dasar (SKD) CAT	Maret 2020	
10	Pengumuman Pelaksanaan SKB	Maret 2020	
11	Pengumuman Hasil Seleksi Kompetensi Bidang (SKB) CAT	Maret 2020	
12	Integrasi Nilai SKD dan SKB	April 2020	
13	Pengumuman Akhir Seleksi Penerimaan CPNS di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Karimun	April 2020	

^{*)} Jadwal pelaksanaan dapat berubah sewaktu-waktu dan akan diumumkan kemudian

Tanjung Balai Karimun, 08 November 2019


BUPATI KARIMUN,

Dr. H. AUNUR RAFIQ, S.Sos, M.Si

**LAMPIRAN : PENGUMUMAN SELEKSI PENERIMAAN CALON PEGAWAI
NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN
KABUPATEN KARIMUN TAHUN 2019**

NOMOR : 625/810/XI/2019

TANGGAL : 08 NOVEMBER 2019

NO	NAMA JABATAN	KUALIFIKASI PENDIDIKAN	LOKASI FORMASI	UNIT ORGANISASI	ALOKASI		
					JUMLAH	DISABI LITAS	UMUM
TENAGA GURU					50	2	48
1.	AHLI PERTAMA - GURU AGAMA ISLAM	S-1 PENDIDIKAN AGAMA ISLAM	SEKRETARIS DAERAH , KEPALA DINAS PENDIDIKAN , KEPALA BIDANG PEMBINAAN KETENAGAAN , KEPALA SEKSI GURU DAN TENAGA KEPENDIDIKAN SEKOLAH DASAR , SDN 004 KUNDUR BARAT , GURU AGAMA ISLAM DINAS PENDIDIKAN	SDN 004 KUNDUR BARAT	5		1
			SEKRETARIS DAERAH , KEPALA DINAS PENDIDIKAN , KEPALA BIDANG PEMBINAAN KETENAGAAN , KEPALA SEKSI GURU DAN TENAGA KEPENDIDIKAN SEKOLAH DASAR , SDN 006 MORO , GURU AGAMA ISLAM DINAS PENDIDIKAN	SDN 006 MORO			1
			SEKRETARIS DAERAH , KEPALA DINAS PENDIDIKAN , KEPALA BIDANG PEMBINAAN KETENAGAAN , KEPALA SEKSI GURU DAN TENAGA KEPENDIDIKAN SEKOLAH DASAR , SDN 007 BELAT , GURU AGAMA ISLAM DINAS PENDIDIKAN	SDN 007 BELAT			1
			SEKRETARIS DAERAH , KEPALA DINAS PENDIDIKAN , KEPALA BIDANG PEMBINAAN KETENAGAAN , KEPALA SEKSI GURU DAN TENAGA KEPENDIDIKAN SEKOLAH DASAR , SDN 008 KUNDUR UTARA , GURU AGAMA ISLAM DINAS PENDIDIKAN	SDN 008 KUNDUR UTARA			1
			SEKRETARIS DAERAH , KEPALA DINAS PENDIDIKAN , KEPALA BIDANG PEMBINAAN KETENAGAAN , KEPALA SEKSI GURU DAN TENAGA KEPENDIDIKAN SEKOLAH MENENGAH PERTAMA , SMPN 2 BURU , GURU AGAMA ISLAM DINAS PENDIDIKAN	SMPN 2 BURU			1
2.	AHLI PERTAMA - GURU BAHASA INDONESIA	S-1 PENDIDIKAN BAHASA INDONESIA	SEKRETARIS DAERAH , KEPALA DINAS PENDIDIKAN , KEPALA BIDANG PEMBINAAN KETENAGAAN , KEPALA SEKSI GURU DAN TENAGA KEPENDIDIKAN SEKOLAH MENENGAH PERTAMA , SMPN 1 MORO , GURU BAHASA INDONESIA DINAS PENDIDIKAN	SMPN 1 MORO	2		1
			SEKRETARIS DAERAH , KEPALA DINAS PENDIDIKAN , KEPALA BIDANG PEMBINAAN KETENAGAAN , KEPALA SEKSI GURU DAN TENAGA KEPENDIDIKAN SEKOLAH MENENGAH PERTAMA , SD-SMPN 2 SATU ATAP UNGAR , GURU BAHASA INDONESIA DINAS PENDIDIKAN	SD-SMPN 2 SATU ATAP UNGAR			1
3.	AHLI PERTAMA - GURU BAHASA INGGRIS	S-1 PENDIDIKAN BAHASA INGGRIS	SEKRETARIS DAERAH , KEPALA DINAS PENDIDIKAN , KEPALA BIDANG PEMBINAAN KETENAGAAN , KEPALA SEKSI GURU DAN TENAGA KEPENDIDIKAN SEKOLAH MENENGAH PERTAMA , SMPN 1 BURU , GURU BAHASA INGGRIS DINAS PENDIDIKAN	SMPN 1 BURU	2		1
			SEKRETARIS DAERAH , KEPALA DINAS PENDIDIKAN , KEPALA BIDANG PEMBINAAN KETENAGAAN , KEPALA SEKSI GURU DAN TENAGA KEPENDIDIKAN SEKOLAH MENENGAH PERTAMA , SD-SMPN 3 SATU ATAP BELAT , GURU BAHASA INGGRIS DINAS PENDIDIKAN	SD-SMPN 3 SATU ATAP BELAT			1
4.	AHLI PERTAMA - GURU BIMBINGAN KONSELING	S-1 PENDIDIKAN BIMBINGAN KONSELING	SEKRETARIS DAERAH , KEPALA DINAS PENDIDIKAN , KEPALA BIDANG PEMBINAAN KETENAGAAN , KEPALA SEKSI GURU DAN TENAGA KEPENDIDIKAN SEKOLAH MENENGAH PERTAMA , SMPN 2 TEBING , GURU BIMBINGAN KONSELING DINAS PENDIDIKAN	SMPN 2 TEBING	2		1
			SEKRETARIS DAERAH , KEPALA DINAS PENDIDIKAN , KEPALA BIDANG PEMBINAAN KETENAGAAN , KEPALA SEKSI GURU DAN TENAGA KEPENDIDIKAN SEKOLAH MENENGAH PERTAMA , SMPN 1 KUNDUR , GURU BIMBINGAN KONSELING DINAS PENDIDIKAN	SMPN 1 KUNDUR			1
5.	AHLI PERTAMA - GURU IPA	S-1 PENDIDIKAN ILMU PENGETAHUAN ALAM	SEKRETARIS DAERAH , KEPALA DINAS PENDIDIKAN , KEPALA BIDANG PEMBINAAN KETENAGAAN , KEPALA SEKSI GURU DAN TENAGA KEPENDIDIKAN SEKOLAH MENENGAH PERTAMA , SMPN 1 BELAT , GURU IPA DINAS PENDIDIKAN	SMPN 1 BELAT	2		1

NO	NAMA JABATAN	KUALIFIKASI PENDIDIKAN	LOKASI FORMASI	UNIT ORGANISASI	ALOKASI		
					JUMLAH	DISABILITAS	UMUM
			SEKRETARIS DAERAH , KEPALA DINAS PENDIDIKAN , KEPALA BIDANG PEMBINAAN KETENAGAAN , KEPALA SEKSI GURU DAN TENAGA KEPENDIDIKAN SEKOLAH MENENGAH PERTAMA , SMPN 1 DURAI , GURU IPA DINAS PENDIDIKAN	SMPN 1 DURAI			1
6.	AHLI PERTAMA - GURU IPS	S-1 PENDIDIKAN ILMU PENGETAHUAN SOSIAL	SEKRETARIS DAERAH , KEPALA DINAS PENDIDIKAN , KEPALA BIDANG PEMBINAAN KETENAGAAN , KEPALA SEKSI GURU DAN TENAGA KEPENDIDIKAN SEKOLAH MENENGAH PERTAMA , SMPN 1 UNGAR , GURU IPS DINAS PENDIDIKAN	SMPN 1 UNGAR	1		1
7.	AHLI PERTAMA - GURU KELAS	S-1 PENDIDIKAN GURU SEKOLAH DASAR (PGSD)	SEKRETARIS DAERAH , KEPALA DINAS PENDIDIKAN , KEPALA BIDANG PEMBINAAN KETENAGAAN , KEPALA SEKSI GURU DAN TENAGA KEPENDIDIKAN SEKOLAH DASAR , SDN 004 KARIMUN , GURU KELAS DINAS PENDIDIKAN	SDN 004 KARIMUN	19		1
			SEKRETARIS DAERAH , KEPALA DINAS PENDIDIKAN , KEPALA BIDANG PEMBINAAN KETENAGAAN , KEPALA SEKSI GURU DAN TENAGA KEPENDIDIKAN SEKOLAH DASAR , SDN 006 KARIMUN , GURU KELAS DINAS PENDIDIKAN	SDN 006 KARIMUN		1	
			SEKRETARIS DAERAH , KEPALA DINAS PENDIDIKAN , KEPALA BIDANG PEMBINAAN KETENAGAAN , KEPALA SEKSI GURU DAN TENAGA KEPENDIDIKAN SEKOLAH DASAR , SDN 011 KARIMUN , GURU KELAS DINAS PENDIDIKAN	SDN 011 KARIMUN			1
			SEKRETARIS DAERAH , KEPALA DINAS PENDIDIKAN , KEPALA BIDANG PEMBINAAN KETENAGAAN , KEPALA SEKSI GURU DAN TENAGA KEPENDIDIKAN SEKOLAH DASAR , SDN 006 BURU , GURU KELAS DINAS PENDIDIKAN	SDN 006 BURU			1
			SEKRETARIS DAERAH , KEPALA DINAS PENDIDIKAN , KEPALA BIDANG PEMBINAAN KETENAGAAN , KEPALA SEKSI GURU DAN TENAGA KEPENDIDIKAN SEKOLAH DASAR , SDN 016 MORO , GURU KELAS DINAS PENDIDIKAN	SDN 016 MORO			1
			SEKRETARIS DAERAH , KEPALA DINAS PENDIDIKAN , KEPALA BIDANG PEMBINAAN KETENAGAAN , KEPALA SEKSI GURU DAN TENAGA KEPENDIDIKAN SEKOLAH DASAR , SDN 010 MERAL , GURU KELAS DINAS PENDIDIKAN	SDN 010 MERAL			1
			SEKRETARIS DAERAH , KEPALA DINAS PENDIDIKAN , KEPALA BIDANG PEMBINAAN KETENAGAAN , KEPALA SEKSI GURU DAN TENAGA KEPENDIDIKAN SEKOLAH DASAR , SDN 006 KUNDUR UTARA , GURU KELAS DINAS PENDIDIKAN	SDN 006 KUNDUR UTARA			1
			SEKRETARIS DAERAH , KEPALA DINAS PENDIDIKAN , KEPALA BIDANG PEMBINAAN KETENAGAAN , KEPALA SEKSI GURU DAN TENAGA KEPENDIDIKAN SEKOLAH DASAR , SDN 016 KUNDUR , GURU KELAS DINAS PENDIDIKAN	SDN 016 KUNDUR		1	
			SEKRETARIS DAERAH , KEPALA DINAS PENDIDIKAN , KEPALA BIDANG PEMBINAAN KETENAGAAN , KEPALA SEKSI GURU DAN TENAGA KEPENDIDIKAN SEKOLAH DASAR , SDN 002 MORO , GURU KELAS DINAS PENDIDIKAN	SDN 002 MORO			1
			SEKRETARIS DAERAH , KEPALA DINAS PENDIDIKAN , KEPALA BIDANG PEMBINAAN KETENAGAAN , KEPALA SEKSI GURU DAN TENAGA KEPENDIDIKAN SEKOLAH DASAR , SDN 002 TEBING , GURU KELAS DINAS PENDIDIKAN	SDN 002 TEBING			1
			SEKRETARIS DAERAH , KEPALA DINAS PENDIDIKAN , KEPALA BIDANG PEMBINAAN KETENAGAAN , KEPALA SEKSI GURU DAN TENAGA KEPENDIDIKAN SEKOLAH DASAR , SDN 003 BELAT , GURU KELAS DINAS PENDIDIKAN	SDN 003 BELAT			1
			SEKRETARIS DAERAH , KEPALA DINAS PENDIDIKAN , KEPALA BIDANG PEMBINAAN KETENAGAAN , KEPALA SEKSI GURU DAN TENAGA KEPENDIDIKAN SEKOLAH DASAR , SDN 003 TEBING , GURU KELAS DINAS PENDIDIKAN	SDN 003 TEBING			1
			SEKRETARIS DAERAH , KEPALA DINAS PENDIDIKAN , KEPALA BIDANG PEMBINAAN KETENAGAAN , KEPALA SEKSI GURU DAN TENAGA KEPENDIDIKAN SEKOLAH DASAR , SDN 011 KUNDUR , GURU KELAS DINAS PENDIDIKAN	SDN 011 KUNDUR			1

NO	NAMA JABATAN	KUALIFIKASI PENDIDIKAN	LOKASI FORMASI	UNIT ORGANISASI	ALOKASI		
					JUMLAH	DISABILITAS	UMUM
			SEKRETARIS DAERAH , KEPALA DINAS PENDIDIKAN , KEPALA BIDANG PEMBINAAN KETENAGAAN , KEPALA SEKSI GURU DAN TENAGA KEPENDIDIKAN SEKOLAH DASAR , SDN 002 UNGAR , GURU KELAS DINAS PENDIDIKAN	SDN 002 UNGAR			1
			SEKRETARIS DAERAH , KEPALA DINAS PENDIDIKAN , KEPALA BIDANG PEMBINAAN KETENAGAAN , KEPALA SEKSI GURU DAN TENAGA KEPENDIDIKAN SEKOLAH DASAR , SDN 017 MORO , GURU KELAS DINAS PENDIDIKAN	SDN 017 MORO			1
			SEKRETARIS DAERAH , KEPALA DINAS PENDIDIKAN , KEPALA BIDANG PEMBINAAN KETENAGAAN , KEPALA SEKSI GURU DAN TENAGA KEPENDIDIKAN SEKOLAH DASAR , SDN 015 MORO , GURU KELAS DINAS PENDIDIKAN	SDN 015 MORO			1
			SEKRETARIS DAERAH , KEPALA DINAS PENDIDIKAN , KEPALA BIDANG PEMBINAAN KETENAGAAN , KEPALA SEKSI GURU DAN TENAGA KEPENDIDIKAN SEKOLAH DASAR , SDN 006 BELAT , GURU KELAS DINAS PENDIDIKAN	SDN 006 BELAT			1
			SEKRETARIS DAERAH , KEPALA DINAS PENDIDIKAN , KEPALA BIDANG PEMBINAAN KETENAGAAN , KEPALA SEKSI GURU DAN TENAGA KEPENDIDIKAN SEKOLAH DASAR , SDN 010 KUNDUR BARAT , GURU KELAS DINAS PENDIDIKAN	SDN 010 KUNDUR BARAT			1
			SEKRETARIS DAERAH , KEPALA DINAS PENDIDIKAN , KEPALA BIDANG PEMBINAAN KETENAGAAN , KEPALA SEKSI GURU DAN TENAGA KEPENDIDIKAN SEKOLAH DASAR , SDN 013 KUNDUR BARAT , GURU KELAS DINAS PENDIDIKAN	SDN 013 KUNDUR BARAT			1
8.	AHLI PERTAMA - GURU KEWARGANEGARAAN	S-1 PENDIDIKAN KEWARGANEGARAAN	SEKRETARIS DAERAH , KEPALA DINAS PENDIDIKAN , KEPALA BIDANG PEMBINAAN KETENAGAAN , KEPALA SEKSI GURU DAN TENAGA KEPENDIDIKAN SEKOLAH MENENGAH PERTAMA , SMPN 2 MORO , GURU KEWARGANEGARAAN DINAS PENDIDIKAN	SMPN 2 MORO	2		1
			SEKRETARIS DAERAH , KEPALA DINAS PENDIDIKAN , KEPALA BIDANG PEMBINAAN KETENAGAAN , KEPALA SEKSI GURU DAN TENAGA KEPENDIDIKAN SEKOLAH MENENGAH PERTAMA , SD-SMPN 4 SATU ATAP MORO , GURU KEWARGANEGARAAN DINAS PENDIDIKAN	SD-SMPN 4 SATU ATAP MORO			1
9.	AHLI PERTAMA - GURU MATEMATIKA	S-1 PENDIDIKAN MATEMATIKA	SEKRETARIS DAERAH , KEPALA DINAS PENDIDIKAN , KEPALA BIDANG PEMBINAAN KETENAGAAN , KEPALA SEKSI GURU DAN TENAGA KEPENDIDIKAN SEKOLAH MENENGAH PERTAMA , SD-SMPN 3 SATU ATAP MORO , GURU MATEMATIKA DINAS PENDIDIKAN	SD-SMPN 3 SATU ATAP MORO	4		1
			SEKRETARIS DAERAH , KEPALA DINAS PENDIDIKAN , KEPALA BIDANG PEMBINAAN KETENAGAAN , KEPALA SEKSI GURU DAN TENAGA KEPENDIDIKAN SEKOLAH MENENGAH PERTAMA , SD-SMPN 2 SATU ATAP DURAI , GURU MATEMATIKA DINAS PENDIDIKAN	SD-SMPN 2 SATU ATAP DURAI			1
			SEKRETARIS DAERAH , KEPALA DINAS PENDIDIKAN , KEPALA BIDANG PEMBINAAN KETENAGAAN , KEPALA SEKSI GURU DAN TENAGA KEPENDIDIKAN SEKOLAH MENENGAH PERTAMA , SMPN 1 KUNDUR BARAT , GURU MATEMATIKA DINAS PENDIDIKAN	SMPN 1 KUNDUR BARAT			1
			SEKRETARIS DAERAH , KEPALA DINAS PENDIDIKAN , KEPALA BIDANG PEMBINAAN KETENAGAAN , KEPALA SEKSI GURU DAN TENAGA KEPENDIDIKAN SEKOLAH MENENGAH PERTAMA , SD-SMPN 2 SATU ATAP BELAT , GURU MATEMATIKA DINAS PENDIDIKAN	SD-SMPN 2 SATU ATAP BELAT			1
10.	AHLI PERTAMA - GURU PENJASORKES	S-1 PENJASORKES	SEKRETARIS DAERAH , KEPALA DINAS PENDIDIKAN , KEPALA BIDANG PEMBINAAN KETENAGAAN , KEPALA SEKSI GURU DAN TENAGA KEPENDIDIKAN SEKOLAH DASAR , SDN 007 MORO , GURU PENJASORKES DINAS PENDIDIKAN	SDN 007 MORO	9		1
			SEKRETARIS DAERAH , KEPALA DINAS PENDIDIKAN , KEPALA BIDANG PEMBINAAN KETENAGAAN , KEPALA SEKSI GURU DAN TENAGA KEPENDIDIKAN SEKOLAH DASAR , SDN 002 TEBING , GURU PENJASORKES DINAS PENDIDIKAN	SDN 002 TEBING			1

NO	NAMA JABATAN	KUALIFIKASI PENDIDIKAN	LOKASI FORMASI	UNIT ORGANISASI	ALOKASI		
					JUMLAH	DISABILITAS	UMUM
			SEKRETARIS DAERAH , KEPALA DINAS PENDIDIKAN , KEPALA BIDANG PEMBINAAN KETENAGAAN , KEPALA SEKSI GURU DAN TENAGA KEPENDIDIKAN SEKOLAH DASAR , SDN 005 UNGAR , GURU PENJASORKES DINAS PENDIDIKAN	SDN 005 UNGAR			1
			SEKRETARIS DAERAH , KEPALA DINAS PENDIDIKAN , KEPALA BIDANG PEMBINAAN KETENAGAAN , KEPALA SEKSI GURU DAN TENAGA KEPENDIDIKAN SEKOLAH DASAR , SDN 001 BELAT , GURU PENJASORKES DINAS PENDIDIKAN	SDN 001 BELAT			1
			SEKRETARIS DAERAH , KEPALA DINAS PENDIDIKAN , KEPALA BIDANG PEMBINAAN KETENAGAAN , KEPALA SEKSI GURU DAN TENAGA KEPENDIDIKAN SEKOLAH DASAR , SDN 006 DURAI , GURU PENJASORKES DINAS PENDIDIKAN	SDN 006 DURAI			1
			SEKRETARIS DAERAH , KEPALA DINAS PENDIDIKAN , KEPALA BIDANG PEMBINAAN KETENAGAAN , KEPALA SEKSI GURU DAN TENAGA KEPENDIDIKAN SEKOLAH DASAR , SDN 005 BELAT , GURU PENJASORKES DINAS PENDIDIKAN	SDN 005 BELAT			1
			SEKRETARIS DAERAH , KEPALA DINAS PENDIDIKAN , KEPALA BIDANG PEMBINAAN KETENAGAAN , KEPALA SEKSI GURU DAN TENAGA KEPENDIDIKAN SEKOLAH DASAR , SDN 012 KUNDUR BARAT , GURU PENJASORKES DINAS PENDIDIKAN	SDN 012 KUNDUR BARAT			1
			SEKRETARIS DAERAH , KEPALA DINAS PENDIDIKAN , KEPALA BIDANG PEMBINAAN KETENAGAAN , KEPALA SEKSI GURU DAN TENAGA KEPENDIDIKAN SEKOLAH MENENGAH PERTAMA , SMPN 3 KARIMUN , GURU PENJASORKES DINAS PENDIDIKAN	SMPN 3 KARIMUN			1
			SEKRETARIS DAERAH , KEPALA DINAS PENDIDIKAN , KEPALA BIDANG PEMBINAAN KETENAGAAN , KEPALA SEKSI GURU DAN TENAGA KEPENDIDIKAN SEKOLAH MENENGAH PERTAMA , SMPN 2 TEBING , GURU PENJASORKES DINAS PENDIDIKAN	SMPN 2 TEBING			1
11.	AHLI PERTAMA - GURU SENI BUDAYA	S-1 PENDIDIKAN KESENIAN / S-1 PENDIDIKAN SENDRATASIK	SEKRETARIS DAERAH , KEPALA DINAS PENDIDIKAN , KEPALA BIDANG PEMBINAAN KETENAGAAN , KEPALA SEKSI GURU DAN TENAGA KEPENDIDIKAN SEKOLAH MENENGAH PERTAMA , SMPN 2 MERAL BARAT , GURU SENI BUDAYA DINAS PENDIDIKAN	SMPN 2 MERAL BARAT	2		1
			SEKRETARIS DAERAH , KEPALA DINAS PENDIDIKAN , KEPALA BIDANG PEMBINAAN KETENAGAAN , KEPALA SEKSI GURU DAN TENAGA KEPENDIDIKAN SEKOLAH MENENGAH PERTAMA , SD-SMPN 3 SATU ATAP DURAI , GURU SENI BUDAYA DINAS PENDIDIKAN	SD-SMPN 3 SATU ATAP DURAI			1
TENAGA KESEHATAN					41	0	41
1.	AHLI PERTAMA - APOTEKER	APOTEKER	SEKRETARIS DAERAH , KEPALA DINAS KESEHATAN , KEPALA PUSKESMAS MERAL , APOTEKER DINAS KESEHATAN	PUSKESMAS MERAL	5		1
			SEKRETARIS DAERAH , KEPALA DINAS KESEHATAN , KEPALA PUSKESMAS TG. BERLIAN , APOTEKER DINAS KESEHATAN	PUSKESMAS TG. BERLIAN			1
			SEKRETARIS DAERAH , KEPALA DINAS KESEHATAN , KEPALA PUSKESMAS NIUR PERMAI , APOTEKER DINAS KESEHATAN	PUSKESMAS NIUR PERMAI			1
			SEKRETARIS DAERAH , KEPALA DINAS KESEHATAN , KEPALA PUSKESMAS TANJUNG BATU , APOTEKER DINAS KESEHATAN	PUSKESMAS TANJUNG BATU			1
			SEKRETARIS DAERAH , KEPALA DINAS KESEHATAN , KEPALA PUSKESMAS MERAL BARAT , APOTEKER DINAS KESEHATAN	PUSKESMAS MERAL BARAT			1
2.	AHLI PERTAMA - BIDAN	S-1/D-IV KEBIDANAN	SEKRETARIS DAERAH , DIREKTUR RUMAH SAKIT UMUM DAERAH , KEPALA BIDANG PELAYANAN , KEPALA SEKSI KEPERAWATAN , BIDAN RUMAH SAKIT UMUM DAERAH MUHAMMAD SANI	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH MUHAMMAD SANI	1		1
3.	AHLI PERTAMA - DOKTER	DOKTER UMUM	SEKRETARIS DAERAH , KEPALA DINAS KESEHATAN , KEPALA PUSKESMAS BELAT , DOKTER DINAS KESEHATAN	PUSKESMAS BELAT	9		1

NO	NAMA JABATAN	KUALIFIKASI PENDIDIKAN	LOKASI FORMASI	UNIT ORGANISASI	ALOKASI		
					JUMLAH	DISABILITAS	UMUM
			SEKRETARIS DAERAH , KEPALA DINAS KESEHATAN , KEPALA PUSKESMAS DURAI , DOKTER DINAS KESEHATAN	PUSKESMAS DURAI			1
			SEKRETARIS DAERAH , KEPALA DINAS KESEHATAN , KEPALA PUSKESMAS TANJUNG BATU , DOKTER DINAS KESEHATAN	PUSKESMAS TANJUNG BATU			1
			SEKRETARIS DAERAH , KEPALA DINAS KESEHATAN , KEPALA PUSKESMAS NIUR PERMAI , DOKTER DINAS KESEHATAN	PUSKESMAS NIUR PERMAI			1
			SEKRETARIS DAERAH , DIREKTUR RUMAH SAKIT UMUM DAERAH , KEPALA BIDANG PELAYANAN , KEPALA SEKSI KEPERAWATAN , DOKTER RUMAH SAKIT UMUM DAERAH MUHAMMAD SANI	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH MUHAMMAD SANI			1
			SEKRETARIS DAERAH , KEPALA DINAS KESEHATAN , KEPALA PUSKESMAS KUNDUR BARAT , DOKTER DINAS KESEHATAN	PUSKESMAS KUNDUR BARAT			1
			SEKRETARIS DAERAH , KEPALA DINAS KESEHATAN , KEPALA PUSKESMAS MORO , DOKTER DINAS KESEHATAN	PUSKESMAS MORO			1
			SEKRETARIS DAERAH , KEPALA DINAS KESEHATAN , KEPALA PUSKESMAS UNGAR , DOKTER DINAS KESEHATAN	PUSKESMAS UNGAR			1
			SEKRETARIS DAERAH , KEPALA DINAS KESEHATAN , KEPALA PUSKESMAS MERAL BARAT , DOKTER DINAS KESEHATAN	PUSKESMAS MERAL BARAT			1
4.	AHLI PERTAMA - DOKTER GIGI	DOKTER GIGI	SEKRETARIS DAERAH , KEPALA DINAS KESEHATAN , KEPALA PUSKESMAS BURU , DOKTER GIGI DINAS KESEHATAN	PUSKESMAS BURU	2		1
			SEKRETARIS DAERAH , KEPALA DINAS KESEHATAN , KEPALA PUSKESMAS DURAI , DOKTER GIGI DINAS KESEHATAN	PUSKESMAS DURAI			1
5.	AHLI PERTAMA - DOKTER SPESIALIS BEDAH	DOKTER SPESIALIS BEDAH	SEKRETARIS DAERAH , DIREKTUR RUMAH SAKIT UMUM DAERAH , KEPALA BIDANG PELAYANAN , KEPALA SEKSI KEPERAWATAN , DOKTER SPESIALIS BEDAH RUMAH SAKIT UMUM DAERAH MUHAMMAD SANI	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH MUHAMMAD SANI	1		1
6.	AHLI PERTAMA - DOKTER SPESIALIS KANDUNGAN	DOKTER SPESIALIS KANDUNGAN	SEKRETARIS DAERAH , DIREKTUR RUMAH SAKIT UMUM DAERAH , KEPALA BIDANG PELAYANAN , KEPALA SEKSI KEPERAWATAN , DOKTER SPESIALIS KANDUNGAN RUMAH SAKIT UMUM DAERAH MUHAMMAD SANI	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH MUHAMMAD SANI	1		1
7.	AHLI PERTAMA - DOKTER SPESIALIS PARU	DOKTER SPESIALIS PARU	SEKRETARIS DAERAH , DIREKTUR RUMAH SAKIT UMUM DAERAH , KEPALA BIDANG PELAYANAN , KEPALA SEKSI KEPERAWATAN , DOKTER SPESIALIS PARU RUMAH SAKIT UMUM DAERAH MUHAMMAD SANI	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH MUHAMMAD SANI	1		1
8.	AHLI PERTAMA - DOKTER SPESIALIS SYARAF	DOKTER SPESIALIS SYARAF	SEKRETARIS DAERAH , DIREKTUR RUMAH SAKIT UMUM DAERAH , KEPALA BIDANG PELAYANAN , KEPALA SEKSI KEPERAWATAN , DOKTER SPESIALIS SYARAF RUMAH SAKIT UMUM DAERAH MUHAMMAD SANI	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH MUHAMMAD SANI	1		1
9.	AHLI PERTAMA - EPIDEMIOLOG KESEHATAN	S-1 KESEHATAN MASYARAKAT (EPIDEMIOLOG)	SEKRETARIS DAERAH , KEPALA DINAS KESEHATAN , KEPALA PUSKESMAS TG. BERLIAN , EPIDEMIOLOG KESEHATAN DINAS KESEHATAN	PUSKESMAS TG. BERLIAN	3		1
			SEKRETARIS DAERAH , KEPALA DINAS KESEHATAN , KEPALA PUSKESMAS KUNDUR BARAT , EPIDEMIOLOG KESEHATAN DINAS KESEHATAN	PUSKESMAS KUNDUR BARAT			1
			SEKRETARIS DAERAH , KEPALA DINAS KESEHATAN , KEPALA PUSKESMAS MERAL BARAT , EPIDEMIOLOG KESEHATAN DINAS KESEHATAN	PUSKESMAS MERAL BARAT			1
10.	AHLI PERTAMA - PENYULUH KESEHATAN MASYARAKAT	S-1 KESEHATAN MASYARAKAT (PROMOSI KESEHATAN)	SEKRETARIS DAERAH , KEPALA DINAS KESEHATAN , KEPALA PUSKESMAS MORO , PENYULUH KESEHATAN MASYARAKAT DINAS KESEHATAN	PUSKESMAS MORO	4		1

NO	NAMA JABATAN	KUALIFIKASI PENDIDIKAN	LOKASI FORMASI	UNIT ORGANISASI	ALOKASI		
					JUMLAH	DISABILITAS	UMUM
			SEKRETARIS DAERAH , KEPALA DINAS KESEHATAN , KEPALA PUSKESMAS DURAI , PENYULUH KESEHATAN MASYARAKAT DINAS KESEHATAN	PUSKESMAS DURAI			1
			SEKRETARIS DAERAH , KEPALA DINAS KESEHATAN , KEPALA PUSKESMAS BURU , PENYULUH KESEHATAN MASYARAKAT DINAS KESEHATAN	PUSKESMAS BURU			1
			SEKRETARIS DAERAH , KEPALA DINAS KESEHATAN , KEPALA PUSKESMAS MERAL BARAT , PENYULUH KESEHATAN MASYARAKAT DINAS KESEHATAN	PUSKESMAS MERAL BARAT			1
11.	AHLI PERTAMA - PERAWAT	NERS	SEKRETARIS DAERAH , KEPALA DINAS KESEHATAN , KEPALA PUSKESMAS TANJUNG BATU , PERAWAT DINAS KESEHATAN	PUSKESMAS TANJUNG BATU	2		1
			SEKRETARIS DAERAH , KEPALA DINAS KESEHATAN , KEPALA PUSKESMAS NIUR PERMAI , PERAWAT DINAS KESEHATAN	PUSKESMAS NIUR PERMAI			1
12.	PELAKSANA/TERAMPIL - BIDAN	D-III KEBIDANAN	SEKRETARIS DAERAH , KEPALA DINAS KESEHATAN , KEPALA PUSKESMAS DURAI , BIDAN DINAS KESEHATAN	PUSKESMAS DURAI	4		1
			SEKRETARIS DAERAH , KEPALA DINAS KESEHATAN , KEPALA PUSKESMAS NIUR PERMAI , BIDAN DINAS KESEHATAN	PUSKESMAS NIUR PERMAI			1
			SEKRETARIS DAERAH , DIREKTUR RUMAH SAKIT UMUM DAERAH , KEPALA BIDANG PELAYANAN , KEPALA SEKSI KEPERAWATAN , BIDAN RUMAH SAKIT UMUM DAERAH MUHAMMAD SANI	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH MUHAMMAD SANI			1
			SEKRETARIS DAERAH , KEPALA DINAS KESEHATAN , KEPALA PUSKESMAS MORO , BIDAN DINAS KESEHATAN	PUSKESMAS MORO			1
13.	PELAKSANA/TERAMPIL - PERAWAT	D-III KEPERAWATAN	SEKRETARIS DAERAH , KEPALA DINAS KESEHATAN , KEPALA PUSKESMAS BELAT , PERAWAT DINAS KESEHATAN	PUSKESMAS BELAT	7		1
			SEKRETARIS DAERAH , KEPALA DINAS KESEHATAN , KEPALA PUSKESMAS DURAI , PERAWAT DINAS KESEHATAN	PUSKESMAS DURAI			1
			SEKRETARIS DAERAH , KEPALA DINAS KESEHATAN , KEPALA PUSKESMAS TANJUNG BATU , PERAWAT DINAS KESEHATAN	PUSKESMAS TANJUNG BATU			1
			SEKRETARIS DAERAH , KEPALA DINAS KESEHATAN , KEPALA PUSKESMAS NIUR PERMAI , PERAWAT DINAS KESEHATAN	PUSKESMAS NIUR PERMAI			1
			SEKRETARIS DAERAH , DIREKTUR RUMAH SAKIT UMUM DAERAH , KEPALA BIDANG PELAYANAN , KEPALA SEKSI KEPERAWATAN , PERAWAT RUMAH SAKIT UMUM DAERAH MUHAMMAD SANI	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH MUHAMMAD SANI			1
			SEKRETARIS DAERAH , KEPALA DINAS KESEHATAN , KEPALA PUSKESMAS MORO , PERAWAT DINAS KESEHATAN	PUSKESMAS MORO			1
			SEKRETARIS DAERAH , KEPALA DINAS KESEHATAN , KEPALA PUSKESMAS MERAL BARAT , PERAWAT DINAS KESEHATAN	PUSKESMAS MERAL BARAT			1
TENAGA TEKNIS / PELAKSANA					31	0	31
1.	AHLI PERTAMA - ARSIPARIS	S-1 KEARSIPAN	SEKRETARIS DAERAH , KEPALA DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN , ARSIPARIS DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN	1		1
2.	ANALIS AKUNTABILITAS KINERJA APARATUR	S-1 EKONOMI / S-1 SOSIAL / S-1 ADMINISTRASI NEGARA / S-1 PEMERINTAHAN	SEKRETARIS DAERAH , KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA , KEPALA BIDANG PENILAIAN KINERJA APARATUR DAN PENGHARGAAN , KEPALA SUB BIDANG PENILAIAN KINERJA APARATUR BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	1		1

NO	NAMA JABATAN	KUALIFIKASI PENDIDIKAN	LOKASI FORMASI	UNIT ORGANISASI	ALOKASI		
					JUMLAH	DISABILITAS	UMUM
3.	ANALIS APLIKASI DAN PENGELOLAAN DATA SISTEM KEUANGAN	S-1 TEKNIK INFORMATIKA / S-1 SISTEM INFORMASI / S-1 AKUNTANSI / S-1 TEKNIK KOMPUTER	SEKRETARIS DAERAH , KEPALA BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH , KEPALA BIDANG ASET DAERAH , KEPALA SUB BIDANG PENATAUSAHAAN ASET DAERAH BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH	1		1
4.	ANALIS DATA DAN INFORMASI	S-1 MANAJEMEN INFORMATIKA / S- 1 TEKNIK INFORMATIKA	SEKRETARIS DAERAH , KEPALA DINAS PENDIDIKAN , SEKRETARIS DINAS PENDIDIKAN , KEPALA SUB BAGIAN PERENCANAAN DAN EVALUASI DINAS PENDIDIKAN	DINAS PENDIDIKAN	1		1
5.	ANALIS DATA DAN INFORMASI PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN	S-1 MANAJEMEN INFORMATIKA / S- 1 TEKNIK INFORMATIKA / S-1 MANAJEMEN SDM	SEKRETARIS DAERAH , KEPALA DINAS PENDIDIKAN , KEPALA BIDANG PEMBINAAN KETENAGAAN , KEPALA SEKSI GURU DAN TENAGA KEPENDIDIKAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI DAN PENDIDIKAN NON FORMAL DINAS PENDIDIKAN	DINAS PENDIDIKAN	1		1
6.	ANALIS HUKUM	S-1 HUKUM	SEKRETARIS DAERAH , ASISTEN PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT , KEPALA BAGIAN HUKUM , KEPALA SUB BAGIAN PRODUK HUKUM DAERAH SEKRETARIAT DAERAH	SEKRETARIAT DAERAH	1		1
7.	ANALIS KOMPETENSI DAN KUALIFIKASI TENAGA KERJA	S-1 PSIKOLOGI / S-1 MANAJEMEN SDM	SEKRETARIS DAERAH , KEPALA DINAS TENAGA KERJA DAN PERINDUSTRIAN , KEPALA BIDANG PELATIHAN DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA , KEPALA SEKSI PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA DINAS TENAGA KERJA DAN PERINDUSTRIAN	DINAS TENAGA KERJA DAN PERINDUSTRIAN	1		1
8.	ANALIS KONSERVASI AIR DAN LINGKUNGAN HIDUP	S-1 TEKNIK LINGKUNGAN / S-1 KESEHATAN LINGKUNGAN	SEKRETARIS DAERAH , KEPALA DINAS LINGKUNGAN HIDUP , KEPALA BIDANG PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP , KEPALA SEKSI PENCEMARAN DAN KERUSAKAN LINGKUNGAN DINAS LINGKUNGAN HIDUP	DINAS LINGKUNGAN HIDUP	1		1
9.	ANALIS KOPERASI	S-1 KOPERASI / S-1 EKONOMI KOPERASI	SEKRETARIS DAERAH , KEPALA DINAS PERDAGANGAN, KOPERASI USAHA KECIL MENENGAH DAN ENERGI SUMBER DAYA MINERAL , KEPALA BIDANG KOPERASI UKM , KEPALA SEKSI PENGAWAS KOPERASI DINAS PERDAGANGAN, KOPERASI USAHA KECIL MENENGAH DAN ENERGI SUMBER DAYA MINERAL	DINAS PERDAGANGAN, KOPERASI USAHA KECIL MENENGAH DAN ENERGI SUMBER DAYA MINERAL	1		1
10.	ANALIS MONITORING, EVALUASI DAN PELAPORAN	S-1 MANAJEMEN / S1 ADMINISTRASI NEGARA / S-1 ADMINISTRASI PUBLIK / S-1 EKONOMI STUDI PEMBANGUNAN / S-1 AKUNTANSI	SEKRETARIS DAERAH , KEPALA BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH , KEPALA BIDANG AKUNTANSI DAN PELAPORAN , KEPALA SUB BIDANG EVALUASI DAN PELAPORAN BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH	1		1
11.	ANALIS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN ANAK	S-1 KESEJAHTERAAN SOSIAL / S-1 PSIKOLOGI / D-IV KESEJAHTERAAN SOSIAL	SEKRETARIS DAERAH , KEPALA DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK , KEPALA BIDANG PERLINDUNGAN HAK PEREMPUAN, KUALITAS HIDUP PEREMPUAN DAN KUALITAS KELUARGA , KEPALA SEKSI PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	1		1
12.	ANALIS PENANAMAN MODAL	S-1 EKONOMI BISNIS / S-1 MANAJEMEN PERUSAHAAN / S-1 HUKUM	SEKRETARIS DAERAH , KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU , KEPALA BIDANG PROMOSI DAN PENANAMAN MODAL , KEPALA SEKSI PERENCANAAN PENANAMAN MODAL DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	1		1
13.	ANALIS PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN	S-1 MANAJEMEN / S-1 EKONOMI / S- 1 ADMINISTRASI / S-1 PSIKOLOGI	SEKRETARIS DAERAH , KEPALA BADAN PERENCANAAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN , KEPALA BIDANG PERENCANAAN PROGRAM MONITORING EVALUASI PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN , KEPALA SUB BIDANG PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN BADAN PERENCANAAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN	BADAN PERENCANAAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN	1		1
14.	ANALIS PENGEMBANGAN SDM APARATUR	S-1 MANAJEMEN / S-1 EKONOMI / S- 1 PSIKOLOGI	SEKRETARIS DAERAH , KEPALA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA , SEKRETARIS SATUAN POLISI PAMONG PRAJA , KEPALA SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN SATPOL PP SATUAN POLISI PAMONG PRAJA	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA	1		1

NO	NAMA JABATAN	KUALIFIKASI PENDIDIKAN	LOKASI FORMASI	UNIT ORGANISASI	ALOKASI		
					JUMLAH	DISABILITAS	UMUM
15.	ANALIS PENYAKIT MENULAR	S-1 KESEHATAN MASYARAKAT	SEKRETARIS DAERAH , KEPALA DINAS KESEHATAN , KEPALA BIDANG PENCEGAHAN DAN PENGENDALIAN PENYAKIT , KEPALA SEKSI PENCEGAHAN DAN PENGENDALIAN PENYAKIT MENULAR DINAS KESEHATAN	DINAS KESEHATAN	1		1
16.	ANALIS SISTEM INFORMASI	S-1 SISTEM INFORMASI / S-1 TEKNIK INFORMATIKA	SEKRETARIS DAERAH , KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL , KEPALA BIDANG PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN , KEPALA SEKSI SISTEM INFORMASI ADMINISTRASI KLEPENDUDUKAN DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	1		1
17.	PELAKSANA/TERAMPIL - AUDITOR	D-III AKUNTANSI / D-III PERPAJAKAN / D-III MANAJEMEN	SEKRETARIS DAERAH , INSPEKTUR , AUDITOR INSPEKTORAT DAERAH	INSPEKTORAT DAERAH	1		1
18.	PENATA KEUANGAN	S-1 EKONOMI / S-1 MANAJEMEN / S- 1 EKONOMI STUDI PEMBANGUN	SEKRETARIS DAERAH , KEPALA DINAS KESEHATAN , KEPALA PUSKESMAS MORO , KEPALA SUB BAGIAN TATA USAHA PUSKESMAS MORO DINAS KESEHATAN	PUSKESMAS MORO	5		1
			SEKRETARIS DAERAH , KEPALA DINAS KESEHATAN , KEPALA PUSKESMAS TANJUNG BATU , KEPALA SUBBAGIAN TATA USAHA PUSKESMAS TANJUNG BATU DINAS KESEHATAN	PUSKESMAS TANJUNG BATU			1
			SEKRETARIS DAERAH , KEPALA DINAS KESEHATAN , KEPALA PUSKESMAS NIUR PERMAI , KEPALA SUB BAGIAN TATA USAHA DINAS KESEHATAN	PUSKESMAS NIUR PERMAI			1
			SEKRETARIS DAERAH , KEPALA DINAS KESEHATAN , KEPALA PUSKESMAS KUNDUR BARAT , KEPALA SUB BAGIAN TATA USAHA PUSKESMAS KUNDUR BARAT DINAS KESEHATAN	PUSKESMAS KUNDUR BARAT			1
			SEKRETARIS DAERAH , KEPALA DINAS KESEHATAN , KEPALA PUSKESMAS MERAL , KEPALA SUB BAGIAN TATA USAHA PUSKESMAS MERAL DINAS KESEHATAN	PUSKESMAS MERAL			1
19.	PENGAWAS PEREMPUAN DAN ANAK	S-1 PSIKOLOGI / S-1 KESEJAHTERAAN SOSIAL	SEKRETARIS DAERAH , KEPALA DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK , KEPALA BIDANG PEMENUHAN HAK DAN PERLINDUNGAN ANAK , KEPALA SEKSI PERLINDUNGAN ANAK DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	1		1
20.	PENGELOLA ADMINISTRASI PEMERINTAHAN	D-III MANAJEMEN / D-III EKONOMI / D-III PEMERINTAHAN / D-III ADMINISTRASI	SEKRETARIS DAERAH , CAMAT MORO , KEPALA SEKSI PEMERINTAHAN KECAMATAN MORO	KECAMATAN MORO	2		1
			SEKRETARIS DAERAH , CAMAT MORO , LURAH MORO TIMUR , KEPALA SEKSI PEMERINTAHAN KELURAHAN MORO TIMUR KECAMATAN MORO	KECAMATAN MORO			1
21.	PENGELOLA AKUNTANSI	D-III AKUNTANSI / D-III MANAJEMEN / D-III ADMINISTRASI / D-III TEKNIK INFORMATIKA	SEKRETARIS DAERAH , ASISTEN ADMINISTRASI UMUM , KEPALA BAGIAN UMUM , KEPALA SUB BAGIAN KEUANGAN SEKRETARIAT DAERAH	SEKRETARIAT DAERAH	1		1

NO	NAMA JABATAN	KUALIFIKASI PENDIDIKAN	LOKASI FORMASI	UNIT ORGANISASI	ALOKASI		
					JUMLAH	DISABILITAS	UMUM
22.	PENGELOLA BINA KESEJAHTERAAN KELUARGA	D-III PSIKOLOGI / D-III KESEHATAN MASYARAKAT	SEKRETARIS DAERAH , KEPALA DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK , KEPALA BIDANG KELUARGA BERENCANA, KETAHANAN DAN KESEJAHTERAAN KELUARGA , KEPALA SEKSI KETAHANAN DAN KESEJAHTERAAN KELUARGA DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	1		1
23.	PENYULUH PENINGKATAN KUALITAS HIDUP PEREMPUAN DAN ANAK	S-1 PSIKOLOGI / D-IV KESEJAHTERAAN SOSIAL / S-1 KESEJAHTERAAN SOSIAL	SEKRETARIS DAERAH , KEPALA DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK , KEPALA BIDANG PERLINDUNGAN HAK PEREMPUAN, KUALITAS HIDUP PEREMPUAN DAN KUALITAS KELUARGA , KEPALA SEKSI PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	1		1
24.	PENYUSUN BAHAN INFORMASI DAN PUBLIKASI	S-1 KOMUNIKASI / S-1 DESAIN KOMUNIKASI VISUAL	SEKRETARIS DAERAH , ASISTEN PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT , KEPALA BAGIAN HUBUNGAN MASYARAKAT , KEPALA SUB BAGIAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA SEKRETARIAT DAERAH	SEKRETARIAT DAERAH	1		1
25.	PENYUSUN BAHAN PENYULUHAN HUKUM	S-1 HUKUM	SEKRETARIS DAERAH , ASISTEN PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT , KEPALA BAGIAN HUKUM , KEPALA SUB BAGIAN BANTUAN, PENYULUHAN HUKUM DAN HAM SEKRETARIAT DAERAH	SEKRETARIAT DAERAH	1		1
26.	TEKNISI LISTRIK DAN JARINGAN	D-III TEKNIK LISTRIK	SEKRETARIS DAERAH , KEPALA DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN KEBERSIHAN , KEPALA BIDANG PERTAMANAN , KEPALA SEKSI PENATAAN, PENGEMBANGAN DAN PERAWATAN LAMPU JALAN DAN LAMPU TAMAN DINAS PERUMAHAN KAWASAN PEMUKIMAN DAN KEBERSIHAN	DINAS PERUMAHAN KAWASAN PEMUKIMAN DAN KEBERSIHAN	1		1


BUPATI KARIMUN

Dr. H. NUNUR RAFIQ, S.Sos, M.Si